



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan. . .

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
16. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah otonom untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II. . .

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Penjabaran Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan RKA-Perangkat Daerah;
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHAMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1621

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 51 TAHUN 2025
TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN
TAHUN 2026





RENJA

RENCANA KERJA

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

TAHUN 2026



dispertanahan.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026.

Renja adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Pertanahan, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, September 2025

Kepala Dinas Pertanahan
Kota Batam



DAHLINA NOPILAWATI, S.T.

Pemula Tingkat I

NIP. 197511212002122004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanian	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian	24
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas	28
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah	28
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	28
2.3.3 Tantangan dan Peluang	29
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah Pertanian	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN	 41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanian	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	 53
 BAB V PENUTUP	 81
5.1 Catatan Penting	81
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	82
5.3 Rencana Tindak Lanjut	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan s/d Tahun 2025 (Tabel T-C.29)	11
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam (Tabel T-C.30)	25
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pertanahan Kota Batam	31
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam	35
Tabel 3.2.1 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Tahun 2026	24
Tabel 3.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam (Tabel T-C.33)	45
Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD	1
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renja	2
Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Dinas Pertanahan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah.

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan pertanahan, strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RKPD



1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan Renja
- Penyusunan Rancangan Awal Renja
- Penyusunan Rancangan Renja
- Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- Perumusan Rancangan Akhir Renja
- Penetapan Renja.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

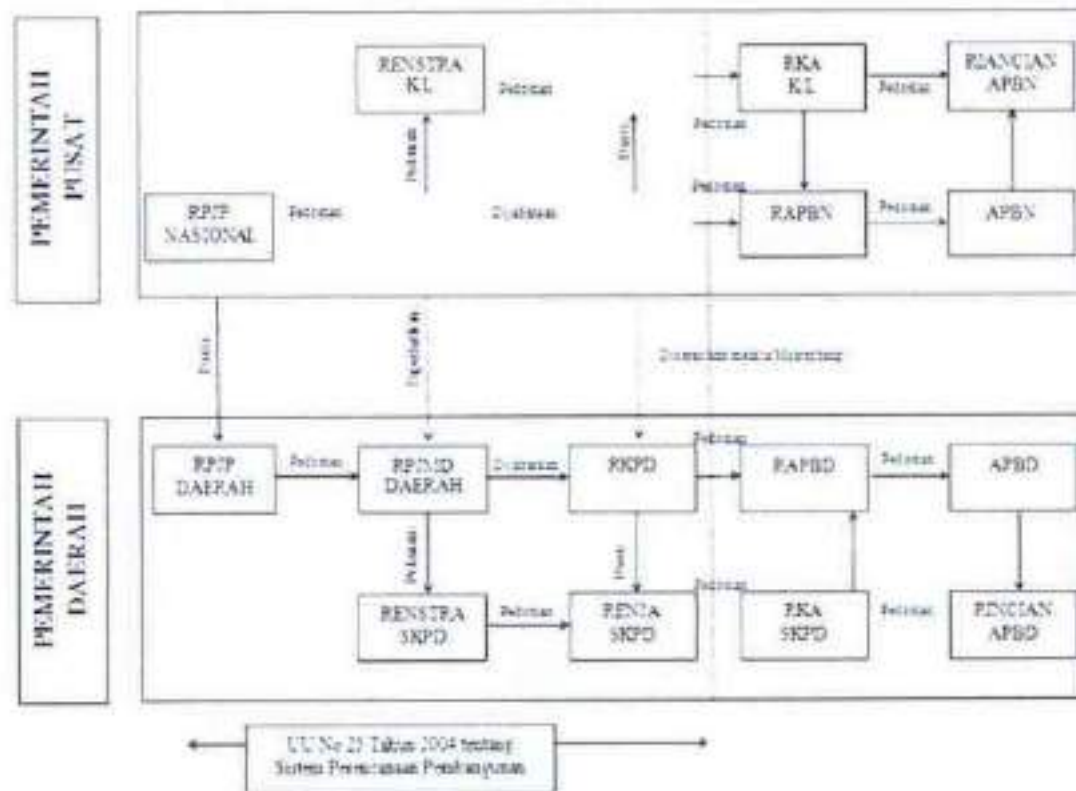


1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.3 Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pertanahan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 119);
29. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 74 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2023;
30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 20 agustus 2025 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);
32. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 35 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem kerja Dinas Pertanahan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1375);
33. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 1614);
34. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2025-2029 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2026, dan memberi gambaran perencanaan program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam ini adalah untuk mensinergikan program dan kegiatan yang ada di Renja

Dinas Pertanahan Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	PENUTUP
5.1	Catatan Penting
5.2	Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.3	Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERTANAHAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan 2024 sebagaimana Tabel 2.2.1 dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi hasil/keluaran yang direncanakan:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi 6 (Enam) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 6.314.327.566,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 6.143.528.156,- atau 97,30% dan realisasi fisik 100,00%, (2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00%, (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 273.114.500,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 244.757.200,- atau 89,62 % dan realisasi fisik 100,00%, (4) Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 0,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00%. (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 12.900.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 0,00%. (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dianggarkan sebesar

- Rp. 200.170.000,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp. 195.049.700,00,- atau 97,44% dan realisasi fisik 100,00%.
- b. Program Penatagunaan Tanah meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota yang dianggarkan sebesar Rp. 742.801.800,- dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir bulan November 2024 adalah sebesar Rp. 553.562.050,- atau 74,52% dan realisasi fisik 74,52%.
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program Penatagunaan Tanah
 - a. Kondisi saat ini sebagian aset tanah Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) tidak memiliki kelengkapan dokumen Penetapan Lokasi (PL), Surat Perjanjian (SPj)/Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (Skep), dan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat dari BP Batam, sehingga belum bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat
 - b. Aset tanah Pemerintah Kota Batam tidak terdapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atau Hak Milik.
 - c. Tidak adanya MoU (Memorandum of Understanding) dan atau Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam sehingga pengurusan sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Batam terhambat.
 - d. Sebagian besar anggaran pengurusan sertifikasi lahan aset Pemko Batam terdapat pada rekomendasi dari BP Batam. Sementara tenaga teknis pada Kantor Pertanahan Kota Batam terkonsentrasi pada kinerja internal berupa kegiatan identifikasi pengumpulan data fisik dan yuridis bidang tanah untuk penataan kota lengkap yang dilaksanakan oleh Tim Yuridis yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Batam dan Dinas Pertanahan Kota Batam, kegiatan pemutahiran zona nilai tanah dan PTSL, dan kegiatan sertifikasi aset pemerintah pusat meliputi BUMN dan instansi vertikal lainnya.
 3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam adalah terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat terkelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya serta

memberikan pelayanan pendaftaran sertifikat pertama kali bagi masyarakat dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam sampai dengan tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lelu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
2	10 01	2.01	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	-	-	-	-	-
2	10 01	2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	-	-	-	-	-
2	10 01	2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	-	-	-	-	-
2	10 01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	50,55%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dar. Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
210012.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	27 orang/bulan	439 orang/bulan	439 orang/bulan	100%	32 orang/bulan	32 orang/bulan	100%
210012.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dok	-	100%	100%	100%	2 dok	67,54%	100%
210012.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	100%	-	-	-	-	-	-
210012.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,67%	100%
210012.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
		beserta Atribut Kelengkapannya								
2	10.01	2.06.00	Sub Kegiatan Peningkatan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 orang	12 orang	-	100%	66,67%	100%
2	10.01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelay- anan Umum Perkantoran	100%	100%	100%	100%	24,56%	100%
2	10.01	2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran- gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran- gan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	100%	100%	100%
2	10.01	2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	4 paket	1 paket	100%	4 paket	24,34%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
		Perengkapan Kantor	Kantor yang Disediakan							
2	10 01	2.06.06.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	100%	100%
2	10 01	2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dok	1 dok	100%	1 dok	50%	100%
2	10 01	2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 laporan	22 laporan	100%	24 laporan	8,66%	100%
2	10 01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	100%	-	100%	28,61%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Regulasi s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
	Pemerintah Daerah	dan fungsi pemerintah								0%
2 10 01 2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2 10 01 2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	-	100%	100%	100%
2 10 01 2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	9 unit	-	-	-	100%	-	100%
2 10 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang tupoksi SKPD	100%	-	-	-	-	100%	41,86%	100%
2 10 01 2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	2 laporan	-	-	-	-	100%	41,86%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
		Sumber Daya Air dan Listrik	dan Listrik yang Disediakan							
2	10.01	2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	-	-	-	-	-
2	10.01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pentunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas fungsi SKPD	100%	100%	100%	100%	53,44%	100%
3	10.01	2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	-	-	-	100%	68,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keharasan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)	
		Kendaraan Dinas Jabatan									
2	10 01 2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	100%	48,18%	100%
2	10 01 2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	27 unit	27 unit	100%	100%	55,96%	100%
2	10 01 2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	-	1 unit	1 unit	1 unit	100%	100%	50%	100%
2	10 04	Program Penyelesaian	Persentase Penyelesaian	20%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
		Sengketa Tanah Garapan	Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam							
2	10	04	2.01	Registan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	20%	-	-	-	-
2	10	04	2.01.05	Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	220 data	-	-	-	-
2	10	06		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah	66,67%	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
2 10 06 2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66,67%	-	-	-	-	-	-	-
2 10 06 2.01.03	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Pemukiman Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 data	-	-	-	-	-	-	-
2 10 08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase peningkatan inventarisasi data pertanahan	25%	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Kerja Tahun 2024	Realisasi Kerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
2 10 08 2.02	Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	25%	-	-	-	-	-	-	-
2 10 08 2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
2 10 10	Program Penaatgunaan Tanah	Persentase tanah sast Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen kepastian Persentase Kualitas Penaatgunaan Tanah Kota Batam	- 79,31%	64,38% -	88,63% -	74,52% -	74,52% -	 73,22%	 28,43%	 100%

Kode	Uraian/Didang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)			
2	10	10	2.01	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hemparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas	-	58,28%	77,33%	64,38%	83,23%	-		
					Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difaalitasi pengurusan dokumen legalitasnya	79,31%	-	-	-	-	73,22%	28,43%	73,22%
2	10	10	2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 laporan	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Didang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2024		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 7/6)	(9)	(10)	(11)
210103	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	48 dok	92 dok	160 dok	81 dok	54%	150 dok	160 dok	150 dok

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam berisikan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan
Kota Batam**

Tabel T-C.30

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset pemko	-	-	50 dok	50 dok	50 dok	51 dok	1 Dok	81 Dok	50 dok	51 dok	Tercapai
2.	Jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat	-	-	100 dok	100 dok	100 dok	100 dok	91 Dok	0 Dok	100 dok	100 dok	Tercapai
3.	Jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan	-	-	10 Kampung	7 Kampung	-	-	1 Kampung	-	-	-	Tercapai
4.	Jumlah kegiatan fasilitasi pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk PSU dan Asec Pemko Batam	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	1 Kegiatan	-	-	-	Tercapai
5.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-	-	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	-	-	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Tercapai

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah tanah aset Pemko Batam 728 bidang/persil, dan yang sudah memiliki sertifikat 252 bidang/persil.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah yang menjadi aset Pemerintah Kota Batam merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 728 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 728 bidang/persil tanah aset. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2026 adalah tercapai, yaitu 728 dokumen sertifikat atau 100,00%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan Dinas Pertanahan untuk meningkatkan capaian target kinerja antara lain melakukan koordinasi secara intensif dan melakukan rekonsiliasi data tanah aset Pemko Batam dengan Bidang Aset BPKAD Kota Batam, BP Batam dan BPN.

Indikator kinerja berupa jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat pada Rancangan Akhir Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 600 dokumen sertifikat atau 100,00% dari target 600 bidang/persil tanah masyarakat. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2025 adalah tercapai, yaitu 600 dokumen sertifikat atau 100,00%.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen tanah membuat sering terjadinya sengketa tanah pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Batam mencoba melakukan kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen sertifikat tanah.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat juga merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tata kelola pertanahan di Kota Batam.

Indikator kinerja berupa jumlah kampung tua yang dilakukan pengukuran untuk proses sertifikasi lahan pada Rancangan Awal Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2021-2026, dengan data capaian pada awal tahun perencanaan (tahun 2020) adalah jumlah kampung tua di Kota Batam adalah 37 Kampung, dan yang sudah dilakukan penataan (penyelesaian legalitas lahan) adalah 7 kampung.

Target capaian kinerja selama periode tahun 2021-2026 adalah 37 kampung tua atau 100,00%. Proyeksi realisasi capaian sampai dengan tahun 2026 adalah tercapai, yaitu 37 kampung atau 100%.

Dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden RI yang ditindaklanjuti oleh Wali Kota Batam sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, diharapkan penyelesaian pensertipikatan lahan masyarakat kampung tua dapat diselesaikan pada tahun 2026.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan serta tugas lain yang diberikan Wali Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam, yang di uraikan dalam Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Batam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain, maka Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Penatagunaan, Pendayagunaan, Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, serta Pengawasan dan Penanganan Masalah Pertanahan.
4. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kota Batam, tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja maupun kinerja

pelayanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

A. Permasalahan Internal

1. Alokasi Anggaran yang belum optimal untuk kebutuhan pendukung pelayanan operasional kantor;
2. Masih rendahnya anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

B. Permasalahan Eksternal

1. Kewenangan penerbitan dokumen legalitas ada di BP Batam dan BPN, dan Kurangnya komitmen pihak terkait (BP Batam dan BPN);
2. Persyaratan penerbitan sertifikat tidak terpenuhi oleh masyarakat;
3. Rekomendasi lahan dari BP Batam sebagian belum terbit.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Pertanahan Kota Batam memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*Strength*)

Adanya kebijakan pimpinan yang didukung dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Tidak optimalnya Inventarisasi Kebutuhan Administrasi Perkantoran;
2. Tidak optimalnya Inventarisasi Kebutuhan pemeliharaan dan penataan sarana dan prasarana;
3. Terbatasnya SDM yang berkualitas dan masih kurangnya kompetensi SDM;
4. Belum optimalnya koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam dan BP Batam.

2.3.3 Tantangan dan Peluang

Untuk pengembangan pelayanan dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu:

- a. Kurangnya lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman;
- b. Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, ganti rugi tanah yang belum memadai dan berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum

diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam;

- c. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan;
- d. Status legalitas lahan masyarakat kampung tua;
- e. Masalah yang dihadapi di daerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau di hinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat);
- f. Kurangnya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah.

Di samping tantangan yang dihadapi terdapat pula beberapa peluang yang dapat mengembangkan pelayanan dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu:

- a. Memperkuat Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam;
- b. Menciptakan payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti, dan Adanya database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam;
- c. Menyelesaikan Penataan Lahan dan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua secara bertahap;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kritis, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kota Batam antara lain:

1. Masih rendahnya ketersediaan barang/bahan operasional pendukung pelayanan administrasi perkantoran;
2. Masih minimnya sarana dan prasarana perkantoran;
3. Tidak diterbitkannya dokumen legalitas lahan aset dan masyarakat oleh Kantor Pertanahan Kota Batam.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan kerangka dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi kewajiban apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan umum anggaran berkaitan dengan arah kebijakan RKPD.

Review terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Dinas Pertanahan Kota Batam**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	INBAS PERTANAHAN									9.676.982.438	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Tersedianya Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah		9.940.193.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Misal SARIP PD Indeks Pelayanan Eksekutifitas PD	73,30 75,50	9.214.714.828	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
1						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tercapai sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	2.122.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
1.1						Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	1.094.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
1.2						Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	1.094.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Keuangan yang Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	7.740.900.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100%	7.813.941.125	Terdapat peningkatan besaran gaji dan tunjangan serta perpindahan subkegiatan baru.
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	439 Orang/ Bulan	7.695.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan	7.774.021.125	Telah dilakukan perhitungan ulang besaran BPKAD.
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	45.000.000						Pindah Subkegiatan menjadi Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0,00	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	39.920.000	Hasil perpindahan dari Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tertibnya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	290.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang dilampirkan kepegawaian	100%	189.624.600	Edisi awal dari hasil analisis kebutuhan

No.	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	55.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	56.436.600	Efisien hasil analisis kebutuhan
3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	233.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	133.188.000	Efisien hasil analisis kebutuhan
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya Administrasi Perkantoran yang Memanjang Tugas SKPD	100%	447.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100%	373.227.300	Pemenuhan anggaran dari hasil analisis kebutuhan
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.072.0000	Efisien hasil analisis kebutuhan
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	140.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.659.500	Efisien hasil analisis kebutuhan
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	29.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	39.787.000	Pemenuhan kuantitas hasil analisis kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	11.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Batam	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.218.840	Efisiensi hasil analisis kebutuhan
4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	260.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	223.000.000	Efisiensi hasil analisis kebutuhan
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	128.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100%	611.022.300	Penyesuaian anggaran dari hasil analisis kebutuhan dan terhadap RPJMD/Restrukturisasi
5.1						Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Batam	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	341.568.000	Pengawasan terhadap RPJMD/Restrukturisasi 2023-2029
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	20.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Batam	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	Efisiensi hasil analisis kebutuhan
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	105.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	269.454.300	Peningkatan kuantitas hasil analisis kebutuhan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Jasa Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	28.462.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	12.900.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana tambahan dan anggaran hasil dari analisis kebutuhan
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	28.462.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	12.000.000	Efisiensi hasil analisis kebutuhan
6.2						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	900.000	Penyesuaian terhadap RKPD/Rencana 2025-2029 dan
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi RKPD	100%	289.728.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100%	211.811.500	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana tambahan dan anggaran hasil dari analisis kebutuhan
7.1						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dianggarkan pekelanya	1 Unit	40.960.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	243.228.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	125.406.500	Penyesuaian terhadap RKPD/Rencana 2025-2029 dan efisiensi hasil analisis kebutuhan
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	45.500.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	45.525.000	Penyesuaian terhadap perubahan harga Standar Biaya Umum (SBU)
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	1 Unit	1.000.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirahabilitasi	0 Unit	0	Pindah subkegiatan menjadi subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
II.	Program Penatagunaan Tanah		Persentase tanah aset Pemko Batam yang memiliki dokumen legalitas, dan persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen	100%	575.846.163	Program Penatagunaan Tanah		Persentase jumlah penatagunaan tanah Kota Batam	79,31%	207.188.800	Penyesuaian terhadap RKPD/Rencana terbaru dan anggaran hasil dari analisis kebutuhan

No.	Rencana Awal RPJPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			Legalitas								
1.	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase lahan aset Pemda Batam yang memiliki dokumen legalitas, persentase tanah masyarakat yang memiliki dokumen legalitas, dan persentase pemetaan lahan kampung tua Kota Batam	100%	575.846.163	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tanah aset Pemda Kota Batam yang dilandaskan pengurusan dokumen legalitasnya	79,81%	307.159.900	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana terbaru dan anggaran hasil dari analisis kebutuhan
1.1						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	13.418.800	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	151 Dokumen	575.846.163	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	193.740.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagi Indikatorif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di Kota Batam	20%	9.188.800	Penyusunan terkait RPJMD/Rencana 2025-2029
						Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Fasilitas Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	20%	9.188.800	Penyusunan terkait RPJMD/Rencana 2025-2029
						Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Batam	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	9.188.800	Penyusunan terkait RPJMD/Rencana 2025-2029
						Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kolektif Masyarakat dan Tanah Abadi		Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitas Legalisasi Tanah	65%	132.000.000	Penyusunan terkait RPJMD/Rencana 2025-2029
						Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kolektif Masyarakat dan		Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kolektif Masyarakat dan Tanah Abadi	65%	132.000.000	Penyusunan terkait RPJMD/Rencana 2025-2029

No.	Rancangan Awal RPJMD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
						Tanah Absentia dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Batam	Jumlah Data Inventarisasi Subjek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Dokumen	132.000.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
						Program Pengolahan Tanah Kosong		Persentase pengolahan inventarisasi data pertanahan	25%	113.340.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
						Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Tanah Kosong		Persentase tanah kosong yang telah diinventarisasi di Kota Batam	25%	113.340.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Batam	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	113.340.000	Penyesuaian terhadap RPJMD/Rencana 2025-2029

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam membuka akses yang luas kepada pemangku kepentingan dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya. Usulan rencana pembangunan dapat berasal *bottom up* yaitu usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota Batam hingga Tingkat Provinsi. Selain itu usulan rencana pembangunan juga berasal dari usulan *top down* dari kunjungan kerja Wali Kota dan Reses DPRD.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan oleh pemangku kepentingan berdasarkan pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Batam yang mana penjarangan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui SIPD yang diajukan kepada Dinas Pertanahan Kota Batam. Namun tidak ada usulan kegiatan dari masyarakat yang harus diverifikasi oleh Dinas Pertanahan Kota Batam berdasarkan ketentuan syarat teknis dan skala usulan prioritas sehingga dapat diakomodir oleh Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan kebutuhan anggaran. Adapun tabel hasil kajian usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Batam

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan Kota Batam

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045 menggariskan Visi Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan yang pelaksanaannya dilaksanakan melalui tahap pembangunan jangka menengah tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2025 berada pada tahap jangka menengah yang ke-1 yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 dengan visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Dinas Pertanahan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pengelolaan pertanahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut tentunya Dinas Pertanahan Kota Batam secara spesifik berada pada kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (*hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman kota, dll*) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai, serta mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir.

Pelestarian adat dan tanah melayu merupakan salah satu program pemerintah yang selalu dipertahankan. Salah satunya penentuan titik atau daerah kampung yang dianggap sudah lama ada dengan nama lainnya Kampung Tua. Dalam RTRW kampung tua tidak pernah ada, akibatnya setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan banyak terjadi permasalahan terutama di daerah mainland (Pulau Batam). Namun melalui arahan dan kebijakan Presiden RI serta dukungan penuh Wali Kota Batam, pada tahun 2019 progres penyelesaian permasalahan kampung tua di Kota Batam mulai nampak dan diharapkan pada tahun

2025 terdapat peningkatan yang signifikan terkait penyelesaian legalitas kampung tua.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025 - 2029 Adapun tujuan dari Dinas Pertanahan adalah meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan Kota Batam.

Sedangkan sasaran dalam mencapai tujuan tersebut mengacu pada Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025 - 2029 adalah meningkatnya legalitas lahan Kota Batam.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, target tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Dinas Pertanahan Tahun 2026 mengacu pada Renstra PD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Target Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026

No	Tujuan/Sasaran PD	Indikator Tujuan/Sasaran PD	Target 2026
1	Meningkatnya legalitas lahan Kota Batam	Persentase tanah aset Pemko dan tanah masyarakat Kota Batam yang memiliki dokumen legalitas	47,74%
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	81,86%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2026 mengacu pada pencapaian visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Batam 2025-2029 yang dirinci dalam Renstra Dinas Pertanahan Tahun 2025 - 2029 Perumusan program dan kegiatan ini dalam rangka mendukung pencapaian Misi Wali Kota Batam Tahun 2025 - 2029 Dalam dokumen RPJMD tersebut telah dijabarkan indikator dan target capaian tiap tahun yang harus dicapai dengan program dan kegiatan tertentu.

Tahun 2026 Dinas Pertanahan mengusulkan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan, 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 9.675.352.425,- (sembilan miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
 - a. Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah
4. Program Pengelolaan Tanah Kosong
 - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong
5. Program Penatagunaan Tanah
 - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

**Tabel 3.2.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan
Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode	Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2			Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			9.675.352.425				11.094.510.471
2	10		Bidang Urusan Pertanahan			9.675.352.425				
2	10	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		78,10 75,5	9.214.714.825			74,57 80	8.844.510.471
2	10	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
			Indeks Pelayanan Ke sekretariat PD							
			Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Terusun Sesuai dengan Tahapan dan Waktu							
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batam	2 Dokumen	1.094.000	APBD		2 Dokumen	20.000.000
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Batam	3 Laporan	1.094.000	APBD		3 Laporan	10.000.000

Kode			Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1001	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	33 Orang/bulan	7.774.021.125	DAU/ PAD		34 Orang/bulan	7.374.117.471
					Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Batam	2 Dokumen	39.920.000	APBD		2 Dokumen	39.920.000
2	1001	2.05	Kegiatan Administrasi Kepagawelan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Batam	1 Paket	56.436.800	APBD		-	-
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Batam	16 Orang	133.188.000	APBD		16 Orang	205.000.000
2	1001	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemerintahan Pelayanan Umum Perkantoran	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Batam	1 Paket	15.072.000	APBD		1 Paket	13.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prahalan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	4 Paket	86.669.500	APBD		4 Paket	86.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Batam	1 Paket	39.787.000	APBD		1 Paket	36.360.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Batam	1 Dokumen	8.218.800	APBD		1 Dokumen	9.800.000
			Sub Kegiatan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batam	44 Laporan	223.490.000	APBD		42 Laporan	250.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	10.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	-	-	-	1 Unit	519.053.000
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Batam	1 Unit	341.568.000	APBD	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	5 Unit	269.484.300	APBD	-	-
2	10.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	2 Laporan	12.000.000	APBD	2 Laporan	13.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prahalasan Maju Rencana Tahun 2027		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batam	1 Laporan	900.000	APBD				
2	10.01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pertantara Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Batam	1 Unit	40.880.000	APBD	1 Unit	45.000.000
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Batam	3 Unit	125.406.500	APBD		4 Unit	170.360.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prairaan Maju Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Dinas Operasional atau Lapangan							
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	30 Unit	45.625.000	APBD		30 Unit	51.500.000
			Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Batam	-	-			1 Unit	1.000.000
2	10.10		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			8.138.800				75.000.000
2	10.10	2. 0 1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Batam	6 Dokumen	8.138.800	APBD		220 Dokumen	75.000.000
			Persentase Penyelesaian Tanah Garapan di Kota Batam							
			Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
			Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/K ota							

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2027	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	10	10		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Persentase Masyarakat Kota Batam yang Mendapat Fasilitasi Legalitas Tanah			132.000.000				1.225.000.000
2	10	10	2. 0 1	Kegiatan Penetapan Subjek Dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Batam	5 Dokumen	132.000.000	APBD	4 Dokumen	1.225.000.000
2	10	10		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Peningkatan Inventarisasi Data Pertanahan			113.340.000				270.000.000
2	10	10	2. 0 1	Kegiatan Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Tanah Kosong yang diinventarisasi di Kota Batam	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Batam	1 Laporan	113.340.000	APBD	3 Laporan	270.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2027	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1010	PROGRAM PENATAAGUNAAN TANAH	Persentase kualitas penatagunaan tanah Kota Batam			207.158.800				670.000.000
2	1010	2.01 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah aset Pemerintah Kota Batam yang difasilitasi pengurusan dokumen legalitasnya	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Batam	4 Laporan	13.418.800	APBD	5 Laporan	340.000.000
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/K ota	Batam	4 Dokumen	193.740.000	APBD	40 Dokumen	330.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN

Dinas Pertanahan Kota Batam pada perencanaan tahun 2026 merupakan tahun ke-2 dalam Renetra Tahun 2025 - 2029 Adapun rencana kerja untuk mendukung tugas dan fungsi serta merealisasikan visi dan misi Dinas Pertanahan Kota Batam untuk Tahun 2026 melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dengan 23 (dua puluh tiga) jenis sub kegiatan beserta usulan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam tabel berikut:

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Subprogram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode + Rencana OPD	Kelempaan Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Progres Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Kerangka Penguatan					Kelempaan Sederhana	Progres Kinerja Rencana Tahun 2024		Peningkat Dampak Penanggung Jawab	
												Target 2024	Peta Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Peta Indikator (Rp)		
																Nasional					Utama
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Pengawasan Peningkat Daerah					2 Dokumen	1.084.800,00	Kota Batu da, Kota da Kota da	REKAPITULASI HASIL KEBERHASILAN (RKD)	Menyusun dan melaksanakan reformasi politik, hukum dan administrasi serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kota, kabupaten, juk, dan penyuluhan	4. Implementasi Reformasi Administrasi dalam rangka pelayanan masyarakat		0,00	REKAPITULASI KEBERHASILAN	
	2	2	0	2,0	000		Berkas Kinerja Peningkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah					2 Laporan	1.084.800,00	Kota Batu da, Kota da Kota da	REKAPITULASI HASIL KEBERHASILAN (RKD)	Menyusun dan melaksanakan reformasi politik, hukum dan administrasi serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat kota, kabupaten, juk, dan penyuluhan	4. Implementasi Reformasi Administrasi dalam rangka pelayanan masyarakat		0,00	REKAPITULASI KEBERHASILAN	

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode Rencana Kerja & RPJG	Indikator Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2024	Prestasi Capaian Target RPJMD Tahun 2023	Capaian Kinerja dan Anggaran Pendanaan						Kategori & Sumber	Prestasi Kinerja Rencana Tahun 2024		Pemerintah Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Pencapaian			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Regional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Pelaksanaan Tugas ADM				2 Dokumen	28.820.000,00	Kota Batu, Kota Batu, Kota Batu	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Meningkatkan informasi politik, budaya dan kreatifitas serta meningkatkan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat, pemuda, wanita, judi, dan penyandang cacat	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat	-		0,00	UMKM PERTANAHAN
	2	1	0	2,0		Administrasi Kepegawaian Pemerintah Daerah						185.424.500,00			Meningkatkan informasi politik, budaya dan kreatifitas serta meningkatkan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat, pemuda, wanita, judi, dan penyandang cacat	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat	-		0,00	
	2	1	0	2,0	2024	Pengadaan Kebijakan Dinas dan Kantor Adm dan Kearsifan														



No	Kode				Uraian / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode & Indikator & OPD	Salinan Capaian di BEMBA OPD Tahun 2024	Pembinaan Capaian Target BEMBA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendukung					Kategori & Sifat	Pembinaan Kinerja Rencana Tahun 2027		Pembinaan Dampak / Peningkatan Kualitas	
										Target 2025	Ragu Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Ragu Indikator (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2	1	0	20		Administrasi dan Perangko Daerah	-				373.222.500,00			Mempertahankan reformasi/pemerataan dan digitalisasi, serta memperluas pemerataan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pemerkosaan	4. Implementasi Reformasi Digital dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat	-	0,00		
	2	1	0	20	000	Pelayanan Kewarganegaraan													
						Listriki/Pemeliharaan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pemeliharaan Bangunan Kantor yang Mandirasi				1 Paket	18.072.000,00	Kota Batu, Kabupaten Kota, Belian	REKAPITULASI HASIL BAKORAH (RAD)	Mempertahankan reformasi/pemerataan dan digitalisasi, serta memperluas pemerataan dan pemerataan korupsi, narkoba, judi, dan pemerkosaan	4. Implementasi Reformasi Digital dalam rangka pemerataan pelayanan masyarakat	-	0,00	DIKAS P. G. / Adm. B. K.	
	2	1	0	20	000	Pelayanan Instalasi dan Pemeliharaan Bangunan Kantor													

No	Kode					Mendan / Bidang Urusan / Maganan / Dukasana / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode 2024 (RPJMD)	Realisasi Capaian RPJMD OPD Tahun 2024	Frekuensi Capaian Tengah RPJMD OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Korangkir Penilaian						Kelompok Substansi	Profil dan Maju Rencana Tahun 2027		Peningkat Usahat Peningkatnya Jarak				
											Target 2026	Page Indikator (%)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikator (%)					
															Nasional	Daerah								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Semua Faktor Perekonomian dan Peningkatan Kantor yang Dikelola				4 Paket	38.889.500,00	Kota Bata da, Bata da Kota, Bata	PENDAPATAN NASIONAL DAERAH (PAD)	Memperkuat ekonomi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemerintahan korup, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	0,00 PERUBAHAN				
	2	1	0	2.0	000	Peningkatan Sistem Cetak dan Pengiriman																	0,00	0,00 PERUBAHAN
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengiriman yang Dikelola				1 Paket	39.787.000,00	Kota Bata da, Bata da Kota, Bata	PENDAPATAN NASIONAL DAERAH (PAD)	Memperkuat ekonomi publik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemerintahan korup, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	0,00 PERUBAHAN				
	2	1	0	2.0	000	Peningkatan Sistem Cetak dan Pengiriman																	0,00	0,00 PERUBAHAN



No	Kode	Unitas / Bidang Urusan / Program / Subprogram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Malar Periode 2024	Realisasi Capaian MENCAPAI OPD Tahun 2024	Preferensi Capaian Target MENCAPAI OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kegiatan Pelaksanaan						Kelompok 2024-2025	Prakiraan Malar Rencana Tahun 2027		Peningkat Daerah Peringkat Jawab				
							Tahun 2026	Page Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tahun 2	Page Indikator (Rp)					
											Nasional	Daerah								
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perbaikan Perencanaan Undangan yang Dibagikan				1 Dokumen	8.218.300,00	Kota Batu da, Batu in Kota, Batu	PENDAPATA N ASDI DAIRAH (PAD)	Mempertah reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Sistem Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DAKAS PESTANANA in				
	2	2	0	2,0	000		Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komitansi SMD													
			Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Komitansi SMD				00 Laporan	223.480.000,00	Kota Batu in, Batu in Kota, Batu	PENDAPATA N ASDI DAIRAH (PAD)	Mempertah reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Sistem Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DAKAS PESTANANA in				

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode + Rencana OPD	Realisasi Capaian MMDA OPD Tahun 2024	Realisasi Capaian Target MMDA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Rangkai Peningkatan						Ketersediaan Sarana	Profil dan Maju Rencana Tahun 2027		Peningkat Dampak Peningkatan Kinerja
											Target 2025	Papan Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Peningkatan			Target	Papan Indikator (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1	0	1	2.0	Pengadaan Barang MMDA Daerah Pemungutan Urusan Pemungutan Daerah	-	-			-	631-022-SURAB			Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0,00		
	2	1	0	1	2.0	Pengadaan Komoditas Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	541.585.000,00	Kota Batu, Kota, Kabupaten	PENDAPATAN ASAL DAERAH (PAD)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0,00	DINAS PERTANJARAN	
	2	1	0	1	2.0	Pengadaan Peralatan dan Bahan Baku														

No	Kode					Urutan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Akut Periodik Rendah OPD	Hasil dan Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Prioritas Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Realisasi Pendaftar						Kelompok Sektor	Profil dan Misi Rencana Tahun 2027		Pemerintah Daerah Penyelenggara
											Target 2026	Pagu Indikasi (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Indikator			Target	Pagu Indikasi (Rp)	
															Makro	Detail				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Unit Pelayanan dan Mekanisme yang Diberikan				SMK	269.454.308,00	Kota Batu Kec. Batu Kec. Batu Kec. Batu	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pelayanan dan pemberantasan korupsi, melalui pendekatan	4. Implementasi Sistem Manajemen dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		0,00		DINAS PEMERINTAHAN
	2	1	0	1	2	0	Pemeliharaan Jasa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah					12.990.000,00			Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pelayanan dan pemberantasan korupsi, melalui pendekatan	4. Implementasi Sistem Manajemen dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		0,00		
	2	1	0	1	2	0	Pemeliharaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													

No	Kode					Lokasi / Bidang Utama / Program / Departemen / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode + Renc + OPD	Rencana di Capaian in RENJA OPD Tahun 2024	Pembacaan in Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja dan Saran/Usulan Pendanaan						Kategori Sarana	Profil dan Rincian Kegiatan Tahun 2024		Pemerintah Daerah Kecamatan Jember
											Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Strategis	Umum				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Konsumen, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	12.000.000,00	Kota Blora daerah Kec. Jember	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Mempertukar informasi politik, hukum dan kebijakan, serta mengurangi pencemaran dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai, budaya, dan kearifan lokal	1. Implementasi of Reformasi Gubernur dalam rangka pengelolaan pelayanan masyarakat	-		12,00	DINAS PERTANJARAN
	2	1	0	2.0	000	Pelayanan Jasa Pelayanan Utama Klien														
							Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Pelayanan Utama Klien yang Disediakan				3 Laporan	980.000,00	Kota Blora daerah Kec. Jember	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Mempertukar reformasi politik, hukum dan kebijakan, serta mengurangi pencemaran dan pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai, budaya, dan kearifan lokal	1. Implementasi of Reformasi Gubernur dalam rangka pengelolaan pelayanan masyarakat	-		12,00	DINAS PERTANJARAN

No	Kode				Uraian / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Misi Periode + Rencstr + OPD	Berkas dan Contoh n KAJIA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target SPTUA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Sarungsi Pendaftar				Kelompok Sasaran	Prakiraan Misi Rencana Tahun 2027		Peningkat Operasi Pemanggunag Jawab			
										Target 2025	Page Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana		Pencapaian			Target	Page Indikator (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	1	0	2.0		Pemerintahan Berbasis MABK Elasmah Pemungutan Kinasan Operasional Elasmah	-	-			-	231.411.500.00			Mempertahkan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi in Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0.00		
	2	1	0	2.0	000	Pemerintahan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, dan Pajak Kemandirian Pemertanggung Jawab Kemandirian Dinas Jabatan														
						Jumlah Kemandirian Pemertanggung Jawab atau Kemandirian Dinas Jabatan yang dipertanggung jawabkan				3.000	40.880.000.00	Jasa Baku, Baku, Baku, Baku, Baku	MENDAPATA NAGRI (DAERAH) (PAD)	Mempertahkan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	4. Implementasi in Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0.00	DIKAS PONTABAKIA		
	2	1	0	2.0	000	Pemerintahan Jasa Pemerintahan, Biaya Pemerintahan, Pajak dan Pemertanggung Jawab Kemandirian Dinas Operasional atau Lapangan														

No	Kode					Urutan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target ASB? Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Pencapaian Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Peningkatan Pelayanan						Ketersediaan Sarana	Pencapaian Misi Rencana Tahun 2027		Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat				
											Target 2025	Page Indikator (dyt)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tipe	Page Indikator (dyt)					
															Nasional	Desentral			Tipe 1		Page Indikator (dyt)			
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diperiksa dan Disertifikasi Pajak dan Pendaftaran				3 Unit	125.400.000,00	Kota Batu, Kabupaten Batu, Kota Batu	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, budaya, kesehatan, jiwa, dan kesejahteraan	4. Implementasi Sistemasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PENGUSAHAAN				
	2	1	0	1	1	600	Peningkatan Pelayanan dan Mesin Lainnya																0,00	DINAS PERUMAHAN
							Jumlah Peningkatan dan Mesin Lainnya yang Diperiksa				30 Unit	25.525.000,00	Kota Batu, Kabupaten Batu, Kota Batu	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	Mempertahankan reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, budaya, kesehatan, jiwa, dan kesejahteraan	4. Implementasi Sistemasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat			0,00	DINAS PERUMAHAN				
2	1	1	0	4			PROGRAM PENINGKATAN SENGKETA ZONASI GABUNGAN	-			-	8.132.800,00						-	0,00					

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Organisasi / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode + Raster + OPD	Besaran Capaian NEMDA OPD Tahun 2024	Pembinaan Capaian Target RENBA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan					Kelompok & Satuan	Pembinaan Monev Rencana Tahun 2027		Pembinaan Uraian Pendampingan	
											Target 2025	Pagu Indikasi (Rp)	Tindak	Sumber Dana	Pencapaian		Target	Pagu Indikasi (Rp)		
															Monev					Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2	1	0	2.0		Penyediaan Sengketa Tanah Sampah dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.198.600,00			Mempertahankan reformasi perwil, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peningkatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, adat, budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan	4. Implementasi of Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0,00		
	2	1	0	2.0	900	Jumlah kasus Perantara dalam 3 (tiga) Daerah Kabupaten/Kota					6 Dikawatir	8.198.600,00	100	REDAKSI	Mempertahankan reformasi perwil, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peningkatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, adat, budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan	4. Implementasi of Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0,00	ONAS PENTANAH	
	2	1	0	2.0		Jumlah Data Kasus Perantara dalam 3 (tiga) Daerah Kabupaten/Kota					6 Dikawatir	8.198.600,00	100	REDAKSI	Mempertahankan reformasi perwil, hukum dan birokrasi, serta memperkuat peningkatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, adat, budaya, kearifan lokal, dan pemberdayaan	4. Implementasi of Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat	-	0,00	ONAS PENTANAH	
3	2	1	0	6		PROSES REKONSTRUKSI TANAH, DAN GANTI BUKUKAN PROGRAM TANAH	-	-			-	192.000.000,00					-	0,00		

No	Kode					Urutan / Bidang Urusan / Program / Outcomes / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode 4 Rencana RPMD	Koefisi- ent Capaian MENCANA OPD Tahun 2024	Pencapai- an Capaian Yang MENCANA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sektoral	Pencapaian Kinerja Rencana Tahun 2024		Peningkatan Urutan Penanggung Jawab
											Target 2026	Page Indikasi (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikasi (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						KORBAN GRAVELOM DAN TANAH ABSENTE														
	2	1	0	2.0		Penerapan Subjek dan Objek Pendaftaran Tanah serta Garis Karut Tanah Kolaborasi Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						132.000.000,00			Mempertah- kan reformasi pertanahan, hukum dan administrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, konflik, sengketa, dan penyelesaian	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		8,00		
	2	1	0	2.0	000	Inventarisasi Subjek Pendaftaran Tanah														
						Jumlah Data Inventarisasi Subjek Pendaftaran Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota					3 Dokumen	132.000.000,00	Kota Bataren, Bataren Kota, Deller	PENDAPATAN NASAL (PAD)	Mempertah- kan reformasi pertanahan, hukum dan administrasi, serta meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, konflik, sengketa, dan penyelesaian	4. Implementasi Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat		8,00	DBUS BERTAMBAH 14	

No	Kode					Uraian / Bidang Urusan / Program / Subprogram / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rencana RPJMD 2024	Realisasi Capaian RPJMD 2024	Prioritas Capaian Target RPJMD 2025	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sektor	Pendanaan Tahun 2027		Pencapaian Daerah Pemangkuang Jarak			
											Target 2024	Pagu Indikasi (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikasi (Rp)				
															Medan	Desa							
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
4	2	1	0	0		PROGRAM PENATAAN TANGKIP KOSONG	-	-			-	113.300.000,00						-	0,00				
	2	1	0	0	2,0	Investasi dan Pemeliharaan Tanah Kosong	-	-			-	113.300.000,00			-	-		-	0,00				
	2	1	0	0	2,0	Pelaksanaan Jerngensi Tanah Kosong																	
							Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang direalisasikan				1 Laporan	113.300.000,00	Kota Bata ra, Bata ra, Kota, Bata ra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DAIRAS PERTAMAHA N			
5	2	1	0	0		PROGRAM PENATAAN TANGKIP	-	-			-	207.100.000,00						-	0,00				
	2	1	0	0	2,0	Penggunaan Tanah yang Kompetitifnya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	207.100.000,00			-	-		-	0,00				
	2	1	0	0	2,0	Kontribusi dan Sinkronisasi Pemecatan Penggunaan Tanah																	
							Jumlah Laporan Kontribusi dan Sinkronisasi Pemecatan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	207.100.000,00	Kota Bata ra, Bata ra, Kota, Bata ra	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DAIRAS PERTAMAHA N			
	2	1	0	0	2,0	Kontribusi dan Sinkronisasi Pemecatan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota																	

No	Kode	Urutan / Bidang Urutan / Program / Outcomes / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode Rencana OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2024	Program Capaian Target RENCANA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja dan Kinerja Pendanaan						Kategori R Sederhana	Pembelian Mula Rencana Tahun 2027		Pembelian Eksternal Peningkatan Jaring
							Target 2026	Page Indikator (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Page Indikator (Rp)	
											Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi/Kelembagaan Kecamatan Kecamatan Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Desember	198.740.000,00	Kota Batam, Kota Batam	PEMDAPAT H ASIA DAERAH (PAD)	*	B. Peningkatan dan Peningkatan Struktur dan Keunggulan Wilayah	*		0,00	DINAS PELTAHAMA
	Jumlah							0,479.362,415,00							0,00	

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2026 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini merupakan penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan agraria melalui pendekatan yang sesuai. Kegiatan ini dilakukan dengan mediasi dan penyuluhan hukum kepada Masyarakat atau pihak bersengketa dan dapat dimohonkan perbantuan fasilitasi dari *stakeholder* pertanahan di Kota Batam antara lain Kantor Pertanahan dan Badan Pengusahaan Batam.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan inventarisasi kasus pertanahan di Kota Batam.

Rincian rencana kegiatan inventarisasi kasus pertanahan di Kota Batam tahun 2026 sebagai berikut :

Input	: Rp. 8.138.800,-
Output	: Jumlah dokumen kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 dokumen
Outcome	: Jumlah dokumen kasus pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 6 dokumen
Benefit	: Tersedia data-data kasus pertanahan
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini merupakan penetapan subjek, objek redistribusi tanah, dan ganti rugi tanah kelebihan maksimum serta tanah absentee dalam satu daerah kabupaten/kota. Proses identifikasi dan pemetaan untuk fasilitasi legalitas lahan Masyarakat di Kota Batam termasuk namun tidak terbatas pada Masyarakat kampung tua dan masyarakat *hinterland*.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah di Kota Batam.

Rincian rencana kegiatan inventarisasi subjek redistribusi tanah di Kota Batam tahun 2026 sebagai berikut:

Input	: Rp. 132.000.000,-
Output	: Jumlah dokumen inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 5 dokumen
Outcome	: Jumlah dokumen inventarisasi subjek penerima redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 5 dokumen
Benefit	: Tersedia data-data subjek penerima redistribusi tanah
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

3. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong*

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan menyeluruh terhadap tanah-tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong.

Pada sub kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakannya kegiatan inventarisasi tanah kosong di Kota Batam.

Rincian rencana kegiatan inventarisasi tanah kosong di Kota Batam tahun 2026 sebagai berikut :

Input	: Rp. 113.340.000,-
Output	: Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
Outcome	: Jumlah laporan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan
Benefit	: Tersedia data-data tanah kosong di Kota Batam
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

4. Program Penatagunaan Tanah

Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mencakup legalitas lahan aset Pemerintah Kota Batam serta koordinasi terkait perencanaan penggunaan tanah di Kota Batam.

Sub kegiatan yang direncanakan pada kegiatan ini adalah

(1) *Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah*

Pada sub kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat (pemerintah, masyarakat, sektor swasta) khususnya stakeholder pertanahan yang berada di Kota Batam.

Rincian rencana kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah tahun 2026 sebagai berikut :

Input	: Rp. 13.418.000,-
Output	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan

Outcome	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Laporan
Benefit	: Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan, dan tertib administrasi pertanahan
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan untuk kegiatan fasilitasi legalitas lahan aset pemerintah Kota Batam.

Kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah Kota Batam ini dilaksanakan dengan cara menginventarisasi kelengkapan administrasi lahan aset Pemko Batam yang meliputi dokumen PL, SPJ skip, rekomendasi, dan sertifikat lahan. Untuk lahan aset yang terdata tidak memiliki dokumen PL, SPJ Skip dan Rekomendasi akan dilakukan pengajuan/pengusulan dokumen dimaksud ke BP Batam. Sedangkan untuk lahan yang sudah memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ skip dan rekomendasi selanjutnya akan dilakukan pengusulan/pengurusan dokumen sertifikat lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Rincian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota tahun 2026 sebagai berikut :

Input	: Rp. 193.740.000,-
Output	: Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 4 Dokumen
Outcome	: Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 4 Dokumen
Benefit	: Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan, dan tertib administrasi pertanahan
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

**5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan indikator persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Input	: Rp. 1.094.000,-
Output	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Input	: Rp. 1.094.000,-
Output	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja persentase ketersediaan administrasi keuangan yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Input	: Rp. 7.774.021.125,-
Output	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan.
Outcome	: Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit	: Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact	: Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- Input : Rp. 39.920.000,-
Output : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja persentase ketersediaan administrasi kepegawaian yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Input : Rp. 56.436.600,-
Output : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Input : Rp. 133.860.000,-
Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 16 Orang.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja tersedianya administrasi umum perkantoran yang

menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input : Rp. 15.072.000,-
 Output : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket.
 Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
 Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
 Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input : Rp. 86.669.500,-
 Output : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket.
 Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
 Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
 Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input : Rp. 39.787.000,-
 Output : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket.
 Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
 Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
 Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Input : Rp. 8.218.800,-
 Output : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen.
 Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
 Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
 Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Input : Rp. 223.480.000,-
Output : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44 Laporan.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Input : Rp. 341.568.000,-
Output : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Input : Rp. 269.454.300,-
Output : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja tersedianya jasa penunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Input : Rp. 12.000.000,-
Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Input : Rp. 900.000,-
Output : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dengan indikator kinerja terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Input : Rp. 40.880.000,-
Output : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Input** : Rp. 125.406.500,-
Output : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

(3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Input** : Rp. 45.525.000,-
Output : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam pada Tahun 2026 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasarkan pada lintas program melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanahan Kota Batam.

Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparaturnya pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Berdasarkan uraian yang telah dinyatakan pada Bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 Dinas Pertanahan Kota Batam disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan untuk mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

5.1 Catatan Penting

Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029 serta berfungsi sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026, perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah kebijakan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan. Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 terdiri atas 5 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Dokumen Renja ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.

Jika dalam proses perkembangannya pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya perubahan seperti: kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah, dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dasar Perubahan RKPD Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan Renja Tahun 2026.

Dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian target Dinas Pertanahan Kota Batam, pelaksanaan terhadap Renja akan dilakukan evaluasi kinerja secara intensif dan periodik.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program dan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2025-2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Beberapa kaidah-kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan Tahun 2026 yang dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RPJMN, RKPD Provinsi, RPJPD Kota, RPJMD Kota, RKPD Kota Batam dan Renstra Perangkat Daerah).
2. Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Pemerintah Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan

- seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
 4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Pertanahan Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2026 yang telah kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam dalam pelayanan pertanahan lingkup Pemerintah Kota Batam.

WALI KOTA BATAM



AMSAKWE ACHMAD